

## ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masalah yang timbul terkait akuntabilitas padat karya tunai Dana Desa yaitu berkaitan dengan terbitnya regulasi baru bahwa dana desa wajib digunakan Padat Karya Tunai sesuai dengan SKB 4 menteri upah minimal harus mencapai 30% dari total bidang pembangunan yang bersumber dari Dana Desa .

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas padat karya tunai dana desa (studi kasus pada Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dari dokumen resmi pemerintah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Serta sudah memenuhi syarat upah sesuai dengan SKB 4 menteri dimana upah dari total pembangunan harus mencapai 30%. Pelaksanaan dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat miskin, pengangguran dan keluarga yang memiliki gizi buruk dibuktikan dengan KTP warga desa Kendal. Meskipun mengalami kendala dalam menentukan kriteria warga miskin namun pelaksana kegiatan anggaran (PKA) berusaha menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Padat Karya Tunai.

Kata Kunci : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan Padat Karya Tunai Dana Desa.

## ABSTRACT

Accountability is an essential issue in scientific studies and practice in the field of public administration. Accountability in managing village funds has become a demand for the village government, so Law Number 6 of 2014 has been implemented concerning villages. Problems arise when the accountability of village funds' labor-intensive cash is related to the new regulation. This policy requires village funds to be used for cash labor following SKB 4; the minimum wage must reach 30% of the total development sector sourced from the Village Fund.

Therefore, this study aimed to describe and analyze cash accountability for labor in village funds (a case study in Kendal Village, Sekaran District, Lamongan Regency). Qualitative interpretive research was applied with interviews, observation, and documentation from official government documents. Furthermore, this study showed that the village fund accountability in Kendal Village, Sekaran District, and Lamongan Regency has gradually implemented participation and transparency principles. The fund had met the wage requirements following SKB 4. The village had to reach 30% of the total development of the fund. Its implementation was carried out in a self-managed manner involving workers from the poor, unemployed, and families with malnutrition, as evidenced by the ID cards of Kendal villagers. Even though they experience obstacles in determining the poor's criteria, the budget activity implementer (PKA) tries to apply accountability in the implementation of development based on the cash-intensive principle.

**Key words:** *planning, implementation, administration, cash labor-intensive reporting*



I certify that this translation is true and accurate  
prepared by a professional translator. This translation is  
provided on this day, 01/12/2020



Nanis Setyurini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Head of STIESIA Language Center

Jl. Menur Pumpungan No. 30 Surabaya, East Java, Indonesia 60118